

ABSTRAK

Tesis ini berjudul "**Penetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Atas Hibah Wasiat**", dengan 2 (dua) pokok permasalahan yaitu Legalitas Hukum terhadap penetapan besaran pungutan BPHTB atas Hibah Wasiat dan Perlindungan hukum bagi wajib pajak BPHTB terhadap Hibah Wasiat. Penelitian ini adalah jenis penelitian normatif yaitu penelitian yang didasarkan pada data sekunder. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hibah Wasiat merupakan pemberian hak atas tanah dan/atau bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum tertentu, yang berlaku setelah pemberi Hibah Wasiat meninggal dunia termasuk objek perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dikenakan BPHTB. Dengan adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri pemungutan pajaknya dengan cara menerbitkan Perda, BPHTB yang semula termasuk kedalam Pajak Pusat kini menjadi Pajak yang dikelola Daerah.. Hasil penelitian dari tesis ini menunjukkan bahwa; (1) dibentuknya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD menimbulkan ketidakadilan pada peraturan BPHTB atas Hibah Wasiat yakni atas penetapan lahirnya pajak terutang BPHTB Hibah Wasiat dan Penetapan Besaran Tarif Pajak atas Hibah Wasiat dengan adanya Ketidakadilan Hukum tersebut beberapa Daerah menerapkan aturan yang berbeda-beda atas Hibah Wasiat (2) Wajib pajak penerima Hibah Wasiat memiliki hak dan kewajiban atas perolehan hak atas tanah dan bangunan yang diterimanya, adanya hak dan kewajiban bagi wajib pajak maka untuk melindungi wajib pajak diberikan perlindungan hukum secara Preventif dan Represif.

Kata Kunci: Penetapan, BPHTB, Hibah Wasiat

ABSTRACT

This thesis is titled "**Determining Land And Building Title Transfer Duty (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) on Testament Grants**", with 2 (two) main issues, Which are Legal Legality on BPHTB on Testament Grants and Legal Protection for Land And Building Title Transfer Duty (BPHTB) on Testament Grants taxpayers. This research is a type of normative research that is a research that is based on secondary data. The approach methods used in this study are the statute Approach and the conceptual approach, Testament grant are the granting of rights to land and/or buildings to private people, or certain legal entity, which is valid after the Grantor has passed away including the object of obtaining rights to land and/or buildings subject to BPHTB, provided in Law 28 of 2009 concerning local taxes and local retribution (PDRD), which gives authority to regional governments to arrange tax collection by yourself by issuing a Regional Regulation, the BPHTB which was originally included in the Central Tax is now a Regional-managed Tax. The results of this research show that; (1) the establishment of Law Number 28 of 2009 concerning PDRD raises injustice in BPHTB regulations on Testament Grants, namely the establishment of BPHTB Debt Tax Testamentary Grants and Determination of the Amount of Tax Rates on Testament Grants in the presence of these Legal Injustices. Differences in Testament Grants (2) Testimony recipient taxpayers have rights and obligations for processing rights to land and buildings that they receive, the rights and obligations of taxpayers so that to protect taxpayers are given legal protection in a Preventive and Repressive manner.

Keywords: Determination, BPHTB, Testament Grants.